



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**TRANSFORMASI PETANI PEDESAAN BERWAWASAN BISNIS
MELALUI KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI BERBASIS
PENDEKATAN DAN MEDIA RAKYAT GUNA MENINGKATKAN
KUALITAS PETANI INDONESIA**

**BIDANG KEGIATAN :
PKM GAGASAN TERTULIS**

Diusulkan oleh :

Ketua :	Muhammad Fadli	H24080092	2008
Anggota :	Putri Anugrah	H24070028	2007
	Dini Marlioni	H24070029	2007

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2011**

HALAMAN PENGESAHAN USUL PKM-GT

1. Judul Kegiatan : Transformasi Petani Pedesaan Berwawasan
Bisnis Melalui Kelembagaan Sosial
Ekonomi Berbasis Pendekatan dan Media
Rakyat Guna Meningkatkan Kualitas
Petani Indonesia
2. Bidang Kegiatan : () PKM-AI (X) PKM-GT
3. Bidang Keilmuan : Sosial Ekonomi
4. Ketua Pelaksana Kegiatan
- a. Nama Lengkap : Muhammad Fadli
 - b. NIM : H24080092
 - c. Jurusan : Manajemen
 - d. Universitas : Institut Pertanian Bogor

Bogor, 28 Februari 2011

Menyetujui,
Ketua Departemen Manajemen

Ketua Pelaksana Kegiatan

(Dr. Ir. Jono M. Munandar, M.Sc)
NIP. 19610123 198601 1002

(Muhammad Fadli)
NIM. H24080092

Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Dosen Pendamping

(Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS.)
NIP. 1958 1228 9850 31003

(Farida Ratna Dewi, SE,MM)
NIP. 19710307 200501 2001

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya yang berlimpah, yang membuat penulis sanggup menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Transformasi Petani Pedesaan Berwawasan Bisnis Melalui Kelembagaan Sosial Ekonomi Berbasis Pendekatan dan Media rakyat Guna Meningkatkan Kualitas Petani Indonesia”.

Selesainya penulisan karya tulis ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis, karena makalah ilmiah ini akan diajukan dalam perlombaan Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tulis tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh DIKTI.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Farida Ratna Dewi, SE, MM. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing, memberikan saran dan dukungannya dalam penulisan karya ilmiah ini, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril dalam penyusunan makalah ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Bogor , 28 Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan.....	1
Manfaat.....	2
GAGASAN	2
Dampak Globalisasi Terhadap Pertanian Indonesia.....	2
Upaya Mempertahankan Sektor Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi Melalui Kelembagaan Sosial Ekonomi	4
Urgensi Sumberdaya Manusia Petani Terhadap Pembangunan Pertanian Pedesaan serta Upaya Pengembangannya dalam Menghadapi Globalisasi	6
KESIMPULAN DAN SARAN.....	11
Kesimpulan.....	11
Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA	12
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Nilai Ekspor Januari 2008-2009	8
---	---

RINGKASAN

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi semakin menempatkan sektor pertanian Indonesia pada posisi sulit. Akibat dari globalisasi secara langsung berefek pada sektor pertanian. Hal itu ditandai dengan masuknya produk pertanian impor yang lebih murah. Pertanian tradisional dengan skala usaha kecil akan sangat sulit bersaing dengan para petani negara lain yang mengimpor produk pertanian mereka ke Indonesia. Apalagi jika mayoritas pemasaran produk pertanian petani masih mengandalkan tengkulak yang memberikan keuntungan yang rendah kepada petani. Dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58 persen diantaranya adalah orang desa dan 70 persennya adalah petani (BPS, 2008). Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 73.798 desa yang terletak di 440 kabupaten. Dari jumlah sebesar itu, hampir setengahnya (45,98 persen) masih tergolong miskin dan tertinggal. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pun menjadikan sulitnya bersaing dengan Negara-negara asing.

Tujuan dari karya tulis ini adalah menganalisis dampak globalisasi terhadap sektor pertanian di Indonesia, merumuskan upaya mempertahankan sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi globalisasi melalui kelembagaan sosial ekonomi, serta menganalisis urgensi sumberdaya manusia pertanian terhadap pembangunan pertanian pedesaan serta upaya pengembangannya dalam menghadapi globalisasi.

Pengumpulan data dan informasi untuk pembuatan karya tulis ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah terdokumentasi sebelumnya (data sekunder). Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah berdasarkan studi pustaka yang dikelompokkan secara sistematis. Data dan informasi yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis untuk kemudian menghasilkan gagasan baru. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Besarnya dampak globalisasi terhadap sektor pertanian Indonesia mengharuskan adanya upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan sektor ini, diantaranya dengan memperkuat kelembagaan sosial ekonomi pertanian di perdesaan. Koperasi merupakan kelembagaan sosial ekonomi yang melandaskan gerakannya pada semangat gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Koperasi merupakan kelembagaan sosial ekonomi yang melandaskan gerakannya pada semangat gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Keberadaan koperasi akan sangat membantu para petani memiliki akses dan posisi tawar dalam pemasaran hasil-hasil pertanian sehingga para petani tidak hanya memfokuskan kegiatannya pada *on farm agribusiness*, tetapi juga *off farm agribusiness*. Langkah-langkah pengembangan sumberdaya manusia petani melalui kelembagaan sosial ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi serta Optimalisasi Penggunaan Media Rakyat pada Kelembagaan Sosial Ekonomi dalam Upaya Pembelajaran Pertanian Berwawasan Bisnis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Data sensus penduduk tahun 2008 menunjukkan bahwa sekitar 56 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan. Namun, sebagian besar penduduk desa adalah miskin dan terbelakang. Dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58 persen diantaranya adalah orang desa dan 70 persennya adalah petani (BPS, 2008).

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 73.798 desa yang terletak di 440 kabupaten. Dari jumlah sebesar itu, hampir setengahnya (45,98 persen) masih tergolong miskin dan tertinggal. Jumlah penduduk miskin terutama memusat di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pemusatan kemiskinan, terutama di desa-desa di Pulau Jawa dan Sumatera, mencapai 78 persen dari total penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2007).

Sementara itu, pertanian kini telah memasuki era globalisasi. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi semakin menempatkan sektor pertanian di Indonesia pada posisi sulit. Pada era tersebut Indonesia tidak hanya memproduksi produk-produk pertanian tetapi juga menjadi pasar dari produk-produk pertanian dari negara lain sehingga terjadi persaingan antara petani satu negara dengan negara lain. Padahal, jika kita melihat kualitas sumberdaya pertanian Indonesia, kondisinya sangat memprihatinkan. Sekitar 80 persen petani Indonesia memiliki tingkat pendidikan formal hanya sampai tamat SD, tidak tamat SD, bahkan tidak sekolah sama sekali. Sementara mereka yang berasal dari lulusan sarjana hanya 3,5 persen.¹

Sementara kualitas sumberdaya pertanian sangat rendah, wibawa sektor pertanian sebagai salah satu sektor penyokong perekonomian nasional juga semakin menurun. Pernyataan ini dibuktikan oleh semakin menurunnya minat generasi muda terhadap studi pertanian, yang dianggap identik dengan kemiskinan dan kebangkrutan. Dari hasil seleksi nasional ujian masuk perguruan tinggi negeri pada tahun 2008, terdapat sisa kursi kosong sebesar 2.894 pada program studi pertanian dan peternakan di 47 perguruan tinggi negeri. Nampak sekali minat kaum muda terhadap pertanian begitu rendah.

Akibat dari rendahnya kualitas petani sebagai pelaku utama sektor pertanian, mayoritas petani berfokus pada kegiatan *on farm agribusiness* berskala kecil. Tidak banyak teknologi dan mekanisasi yang digunakan dalam aktivitas pertanian. Selain itu, arus informasi yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertanian menjadi sangat sulit terjangkau oleh petani. Akibatnya, pendapatan yang diterima petani dari sektor pertanian masih sangat kecil dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani. Selain itu, kondisi ini juga

¹ Pambudy, R. 2010. Sinergi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah. <http://www.seputar-indonesia.com> [28 April 2010].

berefek pada kualitas produk pertanian yang belum optimal baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Dalam menghadapi tantangan perekonomian pasar serta menyongsong era globalisasi, keberhasilan proses pembangunan pertanian tergantung pada penguasaan teknologi pertanian oleh petani dan kemampuan bersaing dari para petani suatu negara. Kondisi ini akan sulit mengingat mayoritas petani di Indonesia adalah petani-petani kecil dengan kualitas sumberdaya manusia yang tergolong sangat rendah.

Tujuan

1. Menganalisis dampak globalisasi terhadap sektor pertanian di Indonesia.
2. Merumuskan upaya mempertahankan sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi globalisasi melalui kelembagaan sosial ekonomi.
3. Merumuskan upaya mempertahankan sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi globalisasi melalui kelembagaan sosial ekonomi.

Manfaat

1. Memberikan gambaran mengenai pertanian pedesaan
2. Memberikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan sektor pertanian dalam menghadapi globalisasi
3. Menjadi referensi dalam penerapannya, baik oleh pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.

GAGASAN

Dampak Globalisasi Terhadap Sektor Pertanian di Indonesia

Globalisasi selalu identik dengan konsep pengurangan kedaulatan sebuah negara, penghilangan batas wilayah sebuah negara, kecanggihan teknologi, penyempitan ruang dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan kepada pemikiran perdagangan bebas. Dalam pandangan Kenichi Ohmae, globalisasi bukan saja membawa ideologi yang bersifat global dalam hal ini demokrasi liberal di kalangan penduduk dunia, tetapi juga turut mengancam proses pembentukan negara bangsa, karena globalisasi pada intinya ingin mewujudkan negara tanpa batas (*Borderless*). Globalisasi adalah sebuah fenomena multi dimensi yang meliputi ekonomi, politik, budaya dan ideologi.²

Menurut Salim (1995), globalisasi mencakup lima unsur penting, yaitu: 1) globalisasi dalam perdagangan, yaitu dengan adanya AFTA, APEC, dan WTO; 2)

² Warganegara, A. 2008. Globalisasi: Pendekatan dalam Ilmu Sosial Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sains dan Teknologi. <http://lemlit.unila.ac.id> [10 Mei 2010].

globalisasi investasi, dimana modal akan mengalir ke tempat yang memberi banyak keuntungan; 3) globalisasi industri, dimana suatu barang tidak hanya diproduksi pada suatu tempat akan tetapi di banyak tempat; 4) globalisasi teknologi, terutama teknologi di bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, dan sebagainya; dan 5) globalisasi konsumsi, dimana terjadi peralihan dari pemenuhan kebutuhan (*needs*) kepada pemenuhan permintaan (*wants*).

Globalisasi pertanian di Indonesia memuncak pada era 1970-an, ketika program Revolusi Hijau (*Green Revolution*) intens diintroduksi. Berbagai input luar produk dari perusahaan-perusahaan *Trans National Corporations* (TNCs) dipaksakan kepada petani untuk diterapkan. Puncaknya tercapai tahun 1985, yaitu swasembada beras. Setelah itu intensitas dan eskalasi pasar input luar semakin menggila seiring dengan dikembangkannya konsepsi agribisnis. Di penghujung abad 20, kebijakan ekonomi makro Indonesia semakin jelas tepolarisasi pada pertumbuhan. Implikasinya, alokasi sumberdaya untuk pembangunan pertanian tergeser oleh sektor manufaktur sebagai sektor prioritas. Dengan demikian, pembangunan yang selayaknya "*agriculture-led*" menjadi di dominasi oleh pembangunan yang bersifat "*manufacturing industries-led*".

Permasalahan pertanian Indonesia dan kesejahteraan petani tidak hanya dipengaruhi oleh *on-farm agribusiness* tetapi juga oleh *off-farm agribusiness*. Arifin (2001:100) menyatakan bahwa dunia agribisnis di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya merupakan suatu "sistem pertanian rakyat" dan hanya sedikit saja yang berupa "sistem perusahaan pertanian". Walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan dan sangat menentukan kinerja secara keseluruhan pertanian Indonesia, akan tetapi perbedaan pada skala usaha, penguasaan teknologi, kemampuan manajemen, dan pespektif pemasaran sudah cukup mewakili kenyataan bahwa keduanya merupakan entitas yang sangat berbeda.

Globalisasi merupakan permasalahan *off-farm agribusiness* yang dihadapi petani saat ini. Makna globalisasi pada dasarnya adalah semakin menipisnya batas-batas hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain dalam berbagai hal, antara lain dalam hal ekonomi, politik, migrasi, komunikasi dan transportasi.

Dampak arus globalisasi dalam bidang pertanian ditandai dengan masuknya produksi pertanian impor yang relatif murah karena diproduksi dengan cara efisien dan pemberian subsidi yang besar pada petani di negara asalnya, produk tersebut membanjiri di pasar-pasar domestik di Indonesia. Gejala perdagangan bebas ditandai dengan mengalirnya beras, gula, kedele, jagung, ayam potong dari beberapa negara tetangga, bahkan akhir-akhir ini udang-pun masuk dari China ke Indonesia.

Sementara itu, petani dan pertanian di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah mendasar, yaitu masih lemahnya *interlinkage* antara penyedia input, pasar, industri pengolahan dan lembaga keuangan dengan para petani kita. Sebenarnya negara kita memiliki potensi pertanian dan sumber bahan baku yang luar biasa namun belum dikelola dengan efisien. Komoditas perikanan, perkebunan, tanaman pangan dan hutan yang luar biasa belum dikelola secara profesional dan efisien untuk meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah bagi petani yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh petani pekebunan kakao kita masih menjualnya dalam bentuk biji kering serta perkebunan kelapa sawit kita yang merupakan produsen kelapa sawit nomor dua di dunia (Kompas, 7 Juli 2004) juga masih menjual dalam bentuk produk primer yang sudah barang tentu memiliki nilai tambah yang sangat rendah jika dibandingkan dengan penjualan produk olahan.

Selain itu, rendahnya pendidikan formal petani Indonesia mengakibatkan rendahnya penguasaan mereka terhadap teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi aktivitas pertanian. Akibatnya, mayoritas petani Indonesia di perdesaan masih mengelola kegiatan pertanian dengan teknologi yang sederhana, skala usaha yang kecil, informasi yang terbatas dengan kecenderungan mengandalkan informasi secara turun-menurun dari generasi sebelumnya dan jaringan komunikasi yang sangat minim.

Artinya, dampak arus globalisasi tidak diiringi dengan penyiapan sumberdaya pertanian Indonesia yang kuat dan kompeten. Realitas yang menunjukkan bahwa sekitar 80 persen petani Indonesia memiliki tingkat pendidikan formal hanya sampai tamat SD, tidak tamat SD, bahkan tidak sekolah sama sekali, dan mereka yang berasal dari lulusan sarjana hanya 3,5 persen menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia pertanian Indonesia sangat membutuhkan perhatian, khususnya dalam menghadapi kuatnya dampak arus globalisasi dewasa ini.

a. Upaya Mempertahankan Sektor Pertanian Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi Melalui Kelembagaan Sosial Ekonomi

Besarnya dampak globalisasi terhadap sektor pertanian Indonesia mengharuskan adanya upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan sektor ini, diantaranya dengan memperkuat kelembagaan sosial ekonomi pertanian di perdesaan. Koperasi merupakan kelembagaan sosial ekonomi yang melandaskan gerakannya pada semangat gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Kehadiran koperasi di perdesaan memiliki banyak dampak positif. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan.

Secara operasional, jika koperasi menjadi lebih berdaya, maka kegiatan produksi dan konsumsi yang jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui koperasi yang telah mendapatkan mandat dari anggota-anggotanya hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingannya melalui wadah koperasi, inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya pemberdayaan koperasi.

Prinsip yang diterapkan pada koperasi adalah prinsip yang berfokus pada anggotanya dimana hal itu akan membuat para petani di perdesaan yang tergabung sebagai anggota koperasi akan sangat terbantu dalam meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, keberadaan koperasi sangat membantu para petani memiliki akses dan posisi tawar dalam pemasaran hasil-hasil pertanian sehingga para petani tidak hanya memfokuskan kegiatannya pada *on farm agribusiness*, tetapi juga *off farm agribusiness*. Produk pertanian yang dipasarkan bukan lagi produk mentah melalui tengkulak, namun melalui koperasi produk yang ditawarkan adalah produk olahan atau produk turunan

melalui serangkaian pengolahan menggunakan teknologi sehingga nilai jual produk ini jauh lebih tinggi dibandingkan produk mentah. Selain itu, koperasi juga membantu dalam jangkauan pemasaran produk melalui jaringan komunikasi dan informasi yang lebih luas. Dengan demikian, produk pertanian perdesaan dapat dipasarkan tidak hanya di pasar-pasar lokal, namun juga di pasar regional, nasional bahkan internasional. Terlebih lagi, melalui koperasi, kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian perdesaan dapat ditingkatkan secara perlahan melalui pendidikan dan pembinaan pertanian di koperasi sehingga para petani dapat melaksanakan fungsi produksi, pengelolaan, pengolahan dan pemasaran produk pertanian dengan optimal.

Namun, kendala yang selama ini dihadapi oleh koperasi adalah masih kecilnya skala usaha, tidak berjalannya prinsip-prinsip ekonomi dan lemahnya sumberdaya manusia yang terlibat di dalamnya. Lemahnya sumberdaya manusia yang terlibat di dalam koperasi merupakan fenomena yang perlu diatasi agar dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan koperasi. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan melalui proses pendidikan, baik melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.

Operasionalisasi pengembangan sumberdaya manusia koperasi melalui berbagai kegiatan pelatihan yang sering dilaksanakan, belum menganalisis warga belajarnya melalui pendekatan sistem sosial ekonomi koperasi. Fenomena yang terjadi sekarang dimana warga belajar lebih ditekankan kepada sub sistem *cooperative enterprise* dan *cooperative group*-nya saja, sehingga pencapaian pelatihan baru akan berdampak pada sebagian sub sistem yang ada. Untuk itu perlu dibuat suatu model pelatihan terpadu dalam koperasi melalui pendekatan sistem sosial ekonomi koperasi berbasis pendekatan dan media rakyat. Pembuatan model pelatihan terpadu bagi koperasi melalui pendekatan sosial ekonomi bertujuan agar dapat:

1. Mengatasi kelemahan sumberdaya manusia koperasi.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi pada sub sistem yang ada dalam sistem sosial koperasi.
3. Memadukan pelaksanaan pendidikan antar sub sistem yang ada sehingga terbentuk kekuatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan terintegrasi dalam suatu arah kepentingan bersama sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi.
4. Adanya suatu model pendidikan terpadu bagi koperasi yang dapat dijadikan dasar kebijakan pelaksanaan pendidikan bagi sumberdaya manusia koperasi.

Data menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi Indonesia periode 2005-2006 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan sebanyak 6.363 unit atau 4,71 persen. Terdapat 4 (empat) propinsi dengan peningkatan jumlah koperasi terbesar (di atas 15 persen) pada periode ini, yaitu: 1) Kepulauan Riau sebesar 27,57 persen; 2) Maluku sebesar 18,07 persen; 3) Gorontalo sebesar 16,82 persen; dan 4) Kalimantan Timur sebesar 15,48 persen. Sedangkan propinsi yang mengalami penurunan jumlah adalah Papua Barat sebesar 12,18 persen. Dari jumlah perkembangan tersebut, jumlah yang aktif untuk periode yang sama secara nasional, tercatat mengalami peningkatan sebanyak 4.126 unit atau 4,35 persen. Ada 5 (lima) propinsi dengan peningkatan jumlah yang aktif terbesar (di atas 15 persen), yaitu: 1)

Kepulauan Riau sebesar 41,11 persen; 2) DKI Jakarta sebesar 20,27 persen; 3) Sulawesi Tengah sebesar 19,40 persen; 4) Maluku Utara sebesar 17,11 persen; dan 5) Kalimantan Tengah sebesar 15,86 persen. Sedangkan perkembangan jumlah yang tidak aktif secara nasional tercatat sebanyak 2.237 unit atau 5,57 persen. Propinsi dengan peningkatan jumlah yang tidak aktif terbesar (diatas 50 persen), yaitu: 1) Kalimantan Timur sebesar 254, 31 persen; 2) Maluku sebesar 52,63 persen; dan 3) Gorontalo sebesar 52,41 persen.³ Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah koperasi Indonesia yang tidak aktif masih menunjukkan angka yang tinggi dibanding jumlah koperasi yang aktif secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembalikan koperasi sebagai kelembagaan sosial ekonomi yang mampu membangun pertanian dan perekonomian perdesaan.

b. Urgensi Sumberdaya Manusia Petani Terhadap Pembangunan Pertanian Pedesaan Serta Upaya Pengembangannya dalam Menghadapi Globalisasi.

Kekeliruan terbesar yang dilakukan dalam proses pembangunan pertanian di Indonesia terletak pada pendekatan dan metodologinya. Ciri dominan yang melekat di dalamnya adalah *top-down* (dipaksakan dari atas), indoktrinatif (bersifat mengajari, bukan mendidik) dan *instant* (berorientasi pada hasil, bukan proses). Pendekatan ini telah menempatkan petani lebih sebagai objek dari program pembangunan. Lewat program revolusi hijau (lebih dikenal sebagai program Bimas, Inmas dan Insus) misalnya, petani padi dipacu untuk berproduksi semaksimal mungkin. Tujuannya agar penyediaan pangan bagi rakyat dapat dijamin. Negara, melalui berbagai instrumen kebijakan, regulasi, dan aparatusnya mulai mengatur apa yang harus dilakukan petani; mulai dari pemilihan bibit (padi), metode atau prosedur budidaya, sampai ke tataniaganya. Semua itu dijalankan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan petani. Negara juga melakukan intervensi secara struktural kelembagaan untuk menyukseskan program pembangunan. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) diterjunkan ke desa-desa untuk mengindoktrinasi (baca: mengajari) petani. Kelompok-kelompok tani dibentuk lewat pendekatan aparat pemerintah desa. KUD-KUD dibentuk sebagai alat (kepanjangan) tangan pemerintah, terutama dalam pengadaan saprotan dan dalam jual-beli produk pertanian. Untuk menjamin kontinuitas produksi, dikurcikanlah kredit usaha tani (KUT) lewat KUD dan bank (BRI). BULOG dan DOLOG dibentuk secara khusus untuk menjamin stabilisasi harga (beras) di pasar. Akhirnya, sebagai pengaman program dilibatkanlah aparat pemerintahan desa, Babinsa dan militer untuk melakukan kontrol politik atas petani. Semua itu dilakukan tanpa memperhitungkan kesiapan dan kemampuan petani, baik secara teknis, ekonomis maupun sosial untuk mengadopsi pola-pola atau teknologi baru (baca: modern) tersebut. Akibat langsung dari kebijakan ini adalah kecenderungan petani Indonesia untuk dijadikan objek yang hanya bekerja di sektor produksi. Sedangkan untuk aspek *off farm agribusiness*, proses dan hasilnya lebih banyak dinikmati oleh tengkulak dan pengusaha pertanian. Sehingga, tingkat kesejahteraan petani Indonesia semakin rendah. Era globalisasi yang ditandai dengan masuknya produk pertanian impor yang

³ Anonim. 2009. Koperasi Indonesia. <http://www.depkop.go.id> [10 Mei 2010].

berkualitas baik dengan tingkat harga yang rendah merupakan ancaman serius bagi sektor pertanian Indonesia.

Data menunjukkan, setiap tahun Indonesia harus mengeluarkan devisa setara dengan Rp 50 triliun untuk membeli enam komoditas pangan dari negara lain. Angka itu sekitar 5 persen dari APBN. Komoditas tersebut meliputi kedelai, gandum, daging sapi, susu, dan gula. Bahkan, garam yang sangat mudah diproduksi di dalam negeri karena sumber dayanya tersedia secara cuma-cuma dari alam tetap masih harus diimpor sebanyak 1,58 juta ton per tahun senilai Rp 900 miliar. Nilai impor kedelai rata-rata setiap tahun mencapai 595 juta dollar AS (setara dengan Rp 5,95 triliun), gandum 2,25 miliar dollar AS (Rp 22,5 triliun), gula 859,5 juta dollar AS (Rp 8,59 triliun), daging sapi 480 juta dollar AS (Rp 4,8 triliun), susu 755 juta dollar AS (Rp 7,55 triliun), dan garam 90 juta dollar AS (Rp 900 miliar).⁴

Berdasarkan data dari Departemen Perindustrian, impor bahan baku susu bagi industri susu maupun industri makanan mencapai 655 juta dollar AS per tahun. Bila ditambah impor dalam bentuk produk olahan, angkanya naik 140 juta dollar AS lagi menjadi 795 juta dollar AS. Guru besar ilmu ekonomi Institut Pertanian Bogor yang sekaligus Sekretaris Jenderal Asia Pacific Agrikultural Policy Forum, Hermanto Siregar mengungkapkan, dampak langsung impor pangan adalah terkurasnya devisa negara. Sedangkan dampak tidak langsung berupa kehilangan peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Keinginan untuk mengurangi jumlah penganggur tidak bisa maksimal. Padahal, dengan memproduksi pangan sendiri, peluang kerja terbuka luas. Dengan anggaran 4,7 miliar dollar AS, Indonesia bisa menyerap berapa banyak tenaga kerja.⁵

Data tersebut bila dibandingkan dengan jumlah ekspor produk pertanian Indonesia masih belum seimbang. Data nilai ekspor Indonesia menurut sektor diberikan pada tabel 1.

Sementara itu, ekspor produk pertanian Indonesia masih didominasi komoditi berbentuk primer seperti kopi dan kakao.⁶ Produk yang diekspor adalah dalam bentuk biji kopi gelondongan, sementara ketika komoditi itu kembali lagi ke Indonesia sudah berbentuk olahan. Untuk memperoleh nilai tambah itu, katanya, perlu dikembangkan industri hilirnya. Peningkatan ekspor sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan petani, ketersediaan lahan dan lapangan kerja. Hal ini dikarenakan jumlah petani gurem saat ini hampir 60 persen (25 juta) dari total petani Indonesia.⁷ Jumlah ini harus diberi kesempatan untuk usaha agribisnis dalam arti luas. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengembangkan sektor-sektor lain seperti industri hilir (pabrik olahan) untuk produk pertanian. Data tersebut merupakan data ekspor produk pertanian dalam bentuk bahan mentah. Sedangkan produksi dan ekspor produk turunan/olahan pertanian Indonesia masih tergolong rendah.

⁴ Anonim. 2009. Indonesia Terjebak Impor Pangan. <http://www.bisniskeuangan.kompas.com> [10 Mei 2010].

⁵ Loc.cit

⁶ Anonim. 2009. Industri Hilir Tingkatkan Nilai Tambah Ekspor Produk Pertanian. <http://www.depkominfo.go.id> [10 Mei 2010].

⁷ Loc.cit

Tabel 1. Nilai Ekspor Indonesia menurut Sektor Januari-November 2008 dan 2009

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)		% Perubahan Jan-Nov 2009 terhadap 2008	% Peran terhadap Total Jan-Nov 20009
	Jan-Nov 2008	Jan-Nov 2009		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total Ekspor	128 123,9	103 145,3	-19,50	100,00
Migas	27 719,3	16 510,0	-40,44	16,01
Nonmigas	100 404,6	86 635,3	-13,71	83,99
Pertanian	4 207,9	3 950,1	-6,12	3,83
Industri	82 619,8	65 291,7	-20,97	63,30
Pertambang an dan lain- lain	13 576,9	17 393,5	28,11	16,85

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah nyata dalam upaya pengembangan produk turunan atau produk olahan pertanian yang bernilai bisnis. Dalam upaya ini maka paradigma berpikir petani sebagai pelaku pertanian harus diubah dari yang hanya berorientasi budi daya menjadi orientasi bisnis. Inilah yang disebut dengan pertanian berwawasan bisnis. Artinya, kegiatan pertanian yang dikembangkan oleh petani bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian dalam bentuk mentah yang siap dijual kepada pihak lain untuk kemudian diolah. Namun, kegiatan pertanian yang dikembangkan juga digunakan untuk menghasilkan produk turunan atau produk olahan pertanian yang bernilai bisnis dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.

Proses mengubah paradigma petani ini merupakan hal yang tidak mudah. Mengingat kualitas dan pendidikan formal petani Indonesia yang masih tergolong rendah. Karena itu dibutuhkan sebuah lembaga sosial ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat desa yang dapat membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dari yang hanya berorientasi budidaya menjadi berorientasi bisnis melalui kegiatan mengolah produk pertanian menjadi produk turunan dan produk olahan pertanian melalui serangkaian penggunaan teknologi dan ide yang kreatif dalam memanfaatkan peluang dan permintaan pasar.

Dalam konteks sistem agribisnis, disamping sub sistem *on farm* (budidaya) dan sub sistem *off farm* (baik yang di hulu yaitu penyediaan input faktor maupun yang di hilir yaitu pengolahan dan pemasaran hasil) terdapat sub sistem penunjang (*supporting service sub system*). Aktivitas pada sub sistem penunjang ini mencakup pendidikan, latihan dan penyuluhan, penelitian dan pengembangan, permodalan dan asuransi, advokasi serta pengadaan aspek legal peraturan yang mendukung. Pada umumnya, sub sistem penunjang ini ditafsirkan sebagai aktivitas yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Karena tentunya petani secara perorangan tidak akan mampu melakukan peran tersebut. Namun demikian, jika para petani bergerak dalam suatu bentuk kerjasama yang *solid*, bukannya tidak mungkin berbagai aktivitas subsistem penunjang ini dapat mereka laksanakan dengan baik. Apalagi dengan karakter masyarakat desa pada umumnya yang memiliki ikatan kekeluargaan, persaudaraan dan kolektivitas yang tinggi, akan lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan aktivitas sub

penunjang ini dalam sebuah kelompok atau ikatan yang mereka bentuk dan jalankan bersama. Menurut Baga (2006), pengembangan kelembagaan pertanian baik itu kelompok tani atau koperasi bagi petani sangat penting terutama dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Dalam wadah organisasi koperasi, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka, walaupun koperasi sendiri memiliki misi khusus dalam pendidikan bagi anggotanya. Langkah-langkah pengembangan sumberdaya manusia petani melalui kelembagaan sosial ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi.

Rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi disebabkan karena kegagalan-kegagalan dan stigma negatif tentang kelembagaan tani atau koperasi yang terbentuk di dalam masyarakat. Kegagalan yang dimaksud diantaranya adalah ketidakmampuan koperasi dalam memberikan kebutuhan anggotanya dan ketidakmampuan dalam memasarkan hasil produk pertanian anggotanya. Sehingga, dibutuhkan sumberdaya manusia pengelola koperasi yang berkualitas dan kompeten dalam melaksanakan serangkaian proses dan manajemen koperasi untuk mensejahterakan anggotanya yang merupakan para petani di perdesaan. Tidak adanya pemimpin (*leader*) yang handal yang mampu memimpin koperasi menjadi kendala utama dalam hal ini. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang berminat dan bersedia menjadi *leader* di koperasi-koperasi perdesaan masih sangat rendah. Apalagi dengan *image* profesi di koperasi yang tidak cukup baik dibanding pegawai negeri sipil atau karyawan swasta. Sehingga, diperlukan adanya pendidikan koperasi di perguruan tinggi untuk meningkatkan minat dan kesadaran lulusan perguruan tinggi untuk berkecimpung sebagai *leader* di koperasi-koperasi perdesaan. Selanjutnya, melalui *leader-leader* yang berkualitas ini, koperasi yang tadinya memiliki stigma negatif dengan ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan anggotanya dapat memberikan pelayanan dan memasarkan hasil produk pertanian para petani anggota. Bukan hanya itu, namun produk yang dipasarkan bukan lagi berupa produk mentah, namun telah diolah melalui serangkaian keterampilan dan teknologi menjadi produk turunan dan produk olahan yang bernilai jual tinggi.

Selain itu, dalam proses pendirian koperasi baru diperlukan adanya ketentuan penguasaan masalah perkoperasian minimal bagi para calon pengurus koperasi. Artinya proses pendaftaran tidak hanya mengevaluasi persyaratan administratif tapi juga yang bersifat substantif. Hal ini untuk mencegah koperasi yang tumpul dalam pelaksanaan pendidikan anggotanya. Secara hukum, diperlukan penegasan kembali Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 yang belum menempatkan pendidikan koperasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar. Saat ini UU tersebut sedang dalam proses perubahan. Sudah sepantasnya, masalah pendidikan ini tertuang secara khusus, tersurat jelas, agar terlihat benar kepentingannya.

2. Optimalisasi Penggunaan Media Rakyat pada Kelembagaan Sosial Ekonomi dalam Upaya Pembelajaran Pertanian Berwawasan Bisnis.

Ciri khas masyarakat desa sebagai suatu komunitas umumnya selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (*simplicity*), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, keterisolasian, dan semacamnya. Uraian-uraian semacam ini selain merupakan upaya untuk mengungkap identitas masyarakat desa yang khas, juga untuk menekankan gambaran yang bersifat statis dari kehidupan masyarakat desa. Upaya untuk mengungkap gambaran statis ini justru sangat penting artinya sebagai landasan untuk memahami perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa. Sebab, melalui pengetahuan tentang aspek statis tersebut, khususnya pengetahuan tentang masyarakat desa ketika mereka (relatif) masih dalam keadaan aslinya pada masa lalu, kita akan dapat membandingkannya dengan keadaan sekarang. Dengan demikian akan menjadi lebih jelas tentang apa yang sedang berubah saat ini, sejauh mana perubahan itu terjadi, bagaimana masyarakat desa menanggapi dan mengadaptasikan diri terhadap perubahan tersebut.

Pembahasan mengenai perubahan dan pembangunan masyarakat desa berlandaskan pada keterkaitan dan interaksi tiga kekuatan, yakni: kekuatan internal yang ada dalam masyarakat desa, kekuatan eksternal terutama yang datang dari arus globalisasi, dan program-program pembangunan pemerintah. Kekuatan-kekuatan internal, baik kultural maupun struktural, cenderung merupakan kekuatan statis yang sekalipun sering ditandai sebagai faktor penghambat perubahan pembangunan, namun sangat menentukan pola adaptasi masyarakat desa terhadap pengaruh-pengaruh luar. Kekuatan luar yang saat ini dirumuskan dengan arus globalisasi, merupakan kekuatan pengubah yang sangat besar bagi proses perubahan yang terjadi di desa. Kekuatan luar lainnya, yang terutama diwakili oleh sosok pemerintah, pada umumnya lebih memihak kepada ideologi yang terkandung dalam arus globalisasi, yaitu berkaitan erat dengan proses modernisasi.

Pada masyarakat pedesaan dimana sebagian besar mereka adalah masyarakat tradisional terdapat berbagai media sosial sebagai sarana efektif saling berinteraksi. Media ini telah sejak lama tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan menjadi media sosialisasi nilai-nilai antar warga masyarakat, bahkan dari generasi ke generasi. Media ini dikenal sebagai media rakyat.

Media sosial adalah wahana komunikasi atau pertukaran informasi yang telah terpola dalam kehidupan sosial suatu komunitas masyarakat. Media sosial menuntut keterlibatan secara fisik individu dalam proses komunikasi (Sigman;124). Media sosial menggunakan komunikasi tatap muka dalam bentuk komunikasi antar personal maupun komunikasi kelompok. Disini proses keterlibatan anggota menjadi sangat penting. Media rakyat ini digambarkan sebagai media yang murah, mudah, bersifat sederhana, dialogis, sesuai dan sah dari segi budaya, bersifat setempat, lentur menghibur dan sekaligus memasyarakat juga sangat dipercaya oleh kalangan masyarakat pedesaan yang kebetulan menjadi kelompok sasaran utama (Oepen; 88).

Ada banyak macam media rakyat yang selama ini tumbuh, berkembang di masyarakat, namun banyak pula yang hilang karena ditinggalkan penggemarnya dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pemilihan media rakyat yang mana yang bisa

digunakan untuk menyebar luaskan ide-ide pembangunan adalah sangat penting untuk mendukung efektifitas pesan. Pilihan hendaknya di jatuhkan pada media rakyat yang paling disukai oleh sebagian besar masyarakat setempat (Colleta dan Kayam ; 235).

Dalam komunikasi tradisional di pedesaan, penggunaan pertunjukan rakyat sebagai media komunikasi mempunyai potensi besar untuk mencapai rakyat banyak, terutama sekali karena media tersebut memiliki daya tarik yang sangat kuat dan berakar di tengah-tengah masyarakat. Media tradisional merupakan alat komunikasi yang sudah lama digunakan di suatu tempat (bersifat lokal) yaitu sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang masih digunakan di daerah itu. Media ini akrab dengan massa khalayak, kaya akan variasi, dengan segera tersedia, dan berbiaya rendah. Media ini dengan segala kelebihanannya memiliki potensi yang dimiliki oleh pertunjukan rakyat dan sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi pembangunan, palagi ketika dikhususkan pada saat otonomi daerah diberlakukan.

Salah satu aplikasi media rakyat ini adalah pemberdayaan peran *sesepuh* atau orang yang dituakan di desa sebagai media dan fasilitator pembelajaran bagi petani. Menurut Sutardjo Kartohadi Koesoemo dan juga Kontjaraningrat, desa-desa di Jawa umumnya bersendikan ikatan daerah, sedangkan desa-desa di luar Jawa bersendikan ikatan darah (geneologis). Hal ini memberikan penjelasan bahwa model pendekatan pendidikan petani perdesaan harus disesuaikan dengan kondisi desa yang menjadi sasaran. Penggunaan bahasa dan perilaku tertentu juga menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan petani perdesaan. Hal ini menyebabkan peran penyuluh yang tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi dan tradisi desa setempat menjadi kurang efektif.

Koperasi merupakan kelembagaan yang bersifat berkelanjutan sehingga program pendidikan petani anggotanya pun dapat dilakukan secara terus-menerus. Hal ini merupakan metode yang sangat efektif, mengingat dalam memasuki era globalisasi, petani dituntut untuk menguasai teknologi tertentu serta informasi dan keahlian dalam melaksanakan aktivitas pertanian yang meliputi produksi, pengelolaan, pengolahan produk pertanian sampai ke pemasaran hasil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dampak globalisasi terhadap sektor pertanian ditandai dengan masuknya produksi pertanian impor yang relatif murah karena diproduksi dengan cara efisien dan pemberian subsidi yang besar pada petani di negara asalnya. Upaya yang dapat ditempuh untuk mempertahankan sektor pertanian dalam menghadapi globalisasi yaitu melalui kelembagaan sosial. Koperasi merupakan kelembagaan sosial ekonomi yang melandaskan gerakannya pada semangat gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Keberadaan

koperasi akan sangat membantu para petani memiliki akses dan posisi tawar dalam pemasaran hasil-hasil pertanian sehingga para petani tidak hanya memfokuskan kegiatannya pada *on farm agribusiness*, tetapi juga *off farm agribusiness*. Langkah-langkah pengembangan sumberdaya manusia petani melalui kelembagaan sosial ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi serta optimalisasi penggunaan media rakyat pada kelembagaan sosial ekonomi dalam upaya pembelajaran pertanian berwawasan bisnis.

Saran

Dalam proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan perlu diadakannya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta teknologi yang tepat guna. Selain itu diperlukan partisipasi dari empat elemen pendukung, seperti pemerintah, pebisnis, akademisi dan masyarakat. Kolaborasi yang baik antar empat elemen pendukung ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2000. *Pendekatan Sentra Kluster dalam Mengembangkan UKM*. Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2007. Data Statistik BPS 2009. http://www.bps.go.id/download_file/data_strategis.pdf
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2008. Data Statistik BPS 2008. http://www.bps.go.id/download_file/data_strategis.pdf
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2007. Data Statistik BPS 2007. http://www.bps.go.id/download_file/data_strategis.pdf
- Pambudy, R. 2010. Sinergi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah. <http://www.seputar-indonesia.com> [28 April 2010].
- Anonim. 2009. Koperasi Indonesia. <http://www.depkop.go.id> [10 Mei 2010].
- Firdaus, M. 2004. *Perkoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kasryno F, editor. 1984. *Prospek Pembangunan Ekonomi Perdesaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Partomo, T.S, Soedodono, A. R. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusidi H. S. 2002. *20 Pokok Pemikiran Tentang Pembangunan Koperasi*. Bandung: Ikopin.
- Sitio A. T. H. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Ikopin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PENULIS 1

DATA UMUM

Nama : Muhammad Fadli
 Tempat, Tanggal Lahir : Ujungpandang, 09 September 1990
 NRP : H24080092
 Departemen/Fakultas : Manajemen/FEM
 Alamat Asal : BTP Blok G No 261, Jl Kerukunan Timur 1,
 Makassar
 Alamat di Bogor : Cibanteng
 No.Tlp : 085656069897

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB (2010 – 2011)
2. Sekretaris Eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB (2009 – 2010)
3. Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama IPB (2008 – 2009)
4. Ketua Forum Administrasi dan Keuangan Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Persiapan Bersama IPB (2008 – 2009)
5. Anggota Forum Mahasiswa Ekonomi Bogor (2010 – 2011)
6. Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan (2008 – sekarang)

KARYA ILMIAH YANG PERNAH DITULIS

1. “*Cookies*” sapu-sapu sebagai cemilan dalam meningkatkan gizi masyarakat Indonesia
2. *Social Entrepreneurship* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

1. Finalis Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomi dan Manajemen (2010)
2. Finalis Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomi dan Manajemen (2011)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PENULIS 2

DATA UMUM

Nama Lengkap : Dini Marliani
 Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang/17 Maret 1989
 Alamat Bogor : Wisma Balio Atas Jl. Babakan Tengah No. 16A
 Bogor Jawa Barat 16680.
 Hp. 081385394659
 Email : teh_ghadies@yahoo.co.id

PENGALAMAN ORGANISASI DAN KEPANITIAAN

- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Periode 2009-2010
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Manajemen Periode 2008-2009
- Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 2 Sumedang Periode 2005-2006
- Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 2 Sumedang Periode 2004-2005
- Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMPN 1 Darmaraja Periode 2001-2002
- Bendahara Acara Femers To Famous- BEM Muda FEM IPB 2008
- Staff Humas Green In Action (Greenation) 2008
- Staff Acara The 4th Banking Goes To Campus (BGTC) 2009
- Sekretaris Kegiatan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa 2010

KARYA ILMIAH YANG PERNAH DITULIS

1. "Strategi Cluster" Sebagai Strategi Terbaik dalam Menghadapi Persaingan Prowider GSM (2009).
2. Peran *Social Entrepreneurship* dalam Membangun Ekonomi Perdesaan Berbasis Komoditas Lokal (2010)
3. Spesialisasi dan Lokalisasi Produk Agribisnis Melalui Kelembagaan Sosial Berbasis Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Global (2010)

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

- Juara 3 (Team) *Marketing Idea Competition* 2009
- Siswa Teladan SMAN 2 Sumedang tahun 2006
- Peserta Terbaik LCTP Bahasa Inggris tahun 2003
- Juara 2 Lomba Baca Puisi Tingkat SMP tahun 2002
- Juara 2 Tingkat Nasional LKTI Bidang Pendidikan
- 20 Besar Karya Terbaik LKTI Sejawat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PENULIS 3

DATA UMUM

Nama	: Putri Anugrah
Tempat, Tanggal Lahir	: Tasikmalaya. 29 Mei 1989
NRP	: H24070028
Departemen/Fakultas	: Manajemen/Ekonomi dan Manajemen
Alamat Asal	: Jl. Seruling Raya no.54 Depok 2 Tengah
Alamat di Bogor	: Rumah Warna Leuwikopo, Bogor
No.Hp/ Tlp Rumah	: 08568787988/ 021-7701248

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Pramuka (2001-2003)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa KM IPB (2007-2008)
3. BEM Muda FEM IPB (2008)
4. Center of Manajemen (2008-2009)
5. Himpunan Mahasiswa Manajemen Jabodetabek (2008-2009)
6. *Syariah Economic Student Club* (2009-2010)

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

1. Mahasiswa Berprestasi Departemen Manajemen IPB (2010)
2. Finalis Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomi dan Manajemen (2010)
3. USMI IPB (2007)
4. Juara 3 “COMIC” Marketing Competition (2009)
5. Nilai Tertinggi UAS SMAN 2 Depok (2007)
6. Duta Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (2009)
7. Lomba Baca puisi dalam PIKNAS IV (2008)
8. Mpok Berbakat Depok (2008)

KARYA ILMIAH YANG PERNAH DITULIS

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001 untuk Meningkatkan Kualitas Produk UKM dalam Menghadapi Perdagangan Bebas (2010)
2. “Strategi Cluster” Sebagai Strategi Terbaik dalam Menghadapi Persaingan Prowider GSM (2009)
3. Jelly Singkong Sebagai Kudapan Bergizi (2009)
4. “Ayam Susuk” sebagai Produk Inovasi Olahan Ayam (2009)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PEMBIMBING

DATA UMUM

Nama : Farida Ratna Dewi, SE, MM
 Alamat Rumah : Jl. Wuwung II No. 57 Perumnas Bantarjati Bogor
 Alamat Kantor : Jl. Lingkar Kampus Gedung Wing Rektorat Lantai 3 Darmaga Bogor
 No. Telepon Rumah : 0251 8321348
 No. Telepon Kantor : 0251 8626435
 No. Handphone : 0812 8512868
 Tempat, Tgl. Lahir : Purbalingga, 7 Maret 1972
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Menikah

KARYA ILMIAH YANG PERNAH DITULIS

Tahun 2005 Perumusan Strategi Pengembangan Sebuah Penerbitan (Studi Kasus : Penerbit Buku Robbani Press)
 Tahun 2006 PraStudi Kelayakan Trading Batik Betawi
 Tahun 2006 Program Pemantapan Kelompok Tani Untuk Pengembangan Usaha Perdesaan di Provinsi Banten

Tahun 2007	Penyusunan Instrumentasi Analisis Standar Belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2007	Analisis Strategi Penyertaan Modal Provinsi DKI Jakarta kepada Beberapa Perusahaan Daerah dan Perusahaan lainnya.
Tahun 2008	Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK)/ Lending Model Industri Kerupuk Udang
Tahun 2008	Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK)/Lending Model Industri Pakaian Jadi
Tahun 2009	Rancang Bangun Model Evaluasi Kinerja Berbasis Pengetahuan Pada Koperasi Susu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional
Tahun 2009	Valuasi Bisnis invensi IPB : Proses dan Komposisi Mie Instant dari Pati dan Gluten Jagung

PENGALAMAN MEMBIMBING PKM

1. Burger Tarakan : Berbahan Dasar Tepung Ampas Tahu dan Daging Ikan Gabus Sebagai Alternatif Jajanan Sehat yang Kaya Protein (tahun 2009)
2. Mie dan Baso Berbahan Baku Tepung Talas Bentul sebagai Produk Diversifikasi dari Tepung Terigu (Tahun 2009)
3. Hula Hut (Tahu Rumput Laut) Sebagai Makanan Alternatif Kaya Serat, Protein, dan Yodium.